

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks Negara berkembang kemiskinan adalah suatu hal lumrah adanya termasuk di Indonesia sendiri yang merupakan salah satu Negara berkembang di Asia Tenggara. Kemiskinan merupakan permasalahan yang terus menjadi fokus perhatian bagi pemerintah. Kemiskinan juga telah menyebabkan masyarakat rela mengorbankan apa saja untuk demi kelangsungan hidup mereka. Kemiskinan yang terus membelenggu juga berdampak pada tingginya tingkat kriminalitas, tindakan tersebut mereka lakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. (*Ripho Delzy Perkasa, 2016*). Untuk mengantisipasi masalah tersebut berbagai kebijakan pun ditempuh oleh pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang terus membelenggu masyarakat agar terlepas dari jeratan kemiskinan. Salah satunya adalah pemberian dana bantuan kepada keluarga miskin (PKH). Hal ini dirasakan sekali langsung oleh seluruh lapisan masyarakat kurang mampu.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (*Bambang Suprpto, dkk, 2019*). Program PKH sudah ada semenjak masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Seiring perkembangan, program ini terus memberi solusi sekaligus menebar manfaat.

Keberhasilan PKH dapat dilihat dengan semakin meningkatnya angka anak usia remaja untuk tetap melanjutkan sekolah hingga tingkat atas (*Ayurestianti, 2017*).

Pemerintahan Koto Ranah Tapan merupakan salah satu penyambung tangan pemerintah pusat dalam hal mengurangi jumlah warga miskin di Koto Ranah Tapan. Salah satu usaha pemerintah Koto Ranah Tapan dalam upaya pemberantasan kemiskinan yang terjadi di Koto Ranah Tapan adalah mengikuti program pemerintah pusat yaitu pencaangan bantuan dana pemerintah (PKH). Yang mana dana tersebut akan di distribusikan untuk warga miskin di Koto Ranah Tapan melalui kantor wali nagari yang ada di Koto Ranah Tapan. Hal itu dilakukan untuk menghindari pendistribusian yang tidak merata atau pembagian yang tidak tepat sasaran, hal ini sering terjadi di lapangan salah satunya adalah di Kantor Wali Nagari Kampung Tebing Tinggi Tapan. Bantuan yang diberikan pemerintah (PKH) kepada warga miskin di lingkungan kampung Tebing Tinggi Tapan tergolong tidak merata, dimana masih banyak orang yang seharusnya berhak, justru tidak mendapatkan dana bantuan tersebut dikarenakan masih menggunakan cara manual dalam pendataan warga miskin seperti pengisian form dalam bentuk kertas yang memakan waktu yang lama serta tingkat kesalahan perhitungan manual yang besar yang membuat bantuan tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Kantor Wali Nagari Kampung Tebing Tinggi Tapan juga belum bisa menentukan keluarga penerima bantuan tersebut secara objektif.

Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan saat ini banyak cara yang dapat digunakan agar pendistribusian bantuan warga miskin (PKH) ke tangan

warga tepat sasaran. Salah satunya adalah dengan membangun sebuah sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi berbasis komputer yang interaktif, dengan cara mengolah data dengan berbagai model untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak terstruktur sehingga dapat memberikan informasi yang bisa digunakan oleh para pengambil keputusan dalam membuat sebuah keputusan (*Roki Hardianto, 2019*). Metode pengambilan keputusan yang digunakan pada sistem penelitian ini adalah metode simple additive weighting (SAW). Metode simple additive weighting bertujuan mendapatkan hasil peringkat tertinggi yang merupakan kandidat terbaik yang dapat direkomendasikan (*Dharyana Suryadijaya, 2017*).

Melalui sistem pendukung keputusan yang akan dibangun dengan menggunakan metode simple additive weighting ini diharapkan nantinya akan dapat membantu pihak penanggung jawab pendistribusian bantuan dana pemerintah (PKH) di Kantor Wali Nagari Kampung Tebing Tinggi Tapan dalam melakukan perhitungan penentuan keluarga miskin lebih valid serta objektif yang menyebabkan bantuan dana pemerintah tersebut (PKH) dapat didistribusikan secara merata dan tepat sasaran.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Kantor Wali Nagari Kampung Tebing Tinggi Tapan dengan judul : **"SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KLASIFIKASI KELUARGA MISKIN SEBAGAI ACUAN PENERIMA BANTUAN DANA PEMERINTAH MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)"**.

1.2 Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah pada identifikasi masalah, maka peneliti memberikan batasan penelitian hanya pada ruang lingkup pemberian dana bantuan (PKH) dengan menerapkan Metode *Simple Additive Weighting* sebagai sistem pendukung keputusan Bantuan keluarga Miskin.

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem Pendukung Keputusan ini hanya digunakan sebagai acuan perhitungan dalam penerimaan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga miskin di Kampung Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
2. Sistem ini tidak bertanggung jawab atas pengeluaran dana bantuan ke masyarakat.
3. Metode yang digunakan hanya metode Simple Additive Weighting.
4. Aplikasi ini dirancang hanya menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL.
5. Data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini hanya berasal dari Kampung Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Jumlah kriteria yang akan digunakan untuk mendapatkan Dana Bantuan keluarga Miskin pada penelitian ini adalah 5(lima) kriteria yaitu :
 - a. Kriteria status kepemilikan rumah
 - b. Kriteria penghasilan

- c. Kriteria aset yang dimiliki
- d. Kriteria sumber air
- e. Kriteria jumlah tanggungan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian :

1. bagaimana cara menjalankan proses pendataan warga miskin yang sebelumnya menggunakan sistem manual berupa pengisian form hingga berubah menjadi sistem yang terkomputerisasi?
2. Bagaimana cara menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) agar dapat mencegah terjadinya kerangkapan data warga miskin?
3. Bagaimana menentukan sistem pendukung keputusan yang tepat, agar pembagian bantuan PKH ini tepat sasaran?

1.4 Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis dapat membuat suatu hipotesa yaitu:

1. Dengan adanya sistem baru berbasis komputerisasi akan membantu pengambil keputusan pemberian bantuan PKH keluarga miskin di Kantor Wali Nagari Kampung Tebing Tinggi Tapan lebih efektif dan efisien.

2. Dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) dapat meminimalkan terjadinya kerangkapan data keluarga miskin di Kantor Wali Nagari Kampung Tebing Tinggi Tapan.
3. Dengan adanya desain sistem yang baru pada Kantor Wali Nagari Kampung Tebing Tinggi Tapan di harapkan dapat membantu pihak penanggung jawab pendistribusian bantuan dana pemerintah (PKH) di Kantor Wali Nagari Kampung Tebing Tinggi Tapan dalam melakukan perhitungan penentuan keluarga miskin lebih valid serta objektif yang menyebabkan bantuan dana pemerintah tersebut dapat didistribusikan secara merata yang sesuai dengan harapan.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu aplikasi sistem pendukung keputusan untuk pemilihan penerima Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Keluarga Miskin.

Adapun uraian dari tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Merancang dan membuat sebuah Sistem Pendukung Keputusan Penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga miskin di Kampung Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang dapat mengolah kriteria dalam menentukan penerima bantuan.

2. Menerapkan *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentukan penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga miskin agar lebih efisien dan tepat sasaran.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Kantor Wali Nagari Kampung Tebing Tinggi Tapan
 - a. Mempermudah dalam penyajian informasi yang akurat dan aktual serta lengkap dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).
 - b. Mempermudah dalam menentukan keluarga yang lebih berhak dan layak sebagai penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Bagi Penulis
 - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai Bagaimana menerapkan Sistem Pendukung Keputusan dengan menggunakan Metode *Simple Additive Weighting* untuk menentukan pemberian Dana Bantuan Keluarga Miskin.
 - b. Dapat menerapkan ilmu yang selama ini peneliti terima dibangku perkuliahan serta mengembangkan kemampuan untuk melakukan analisa terhadap suatu masalah yang lebih kritis.

3. Bagi Kampus

- a. Sebagai bahan untuk menambah referensi di Perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang khususnya program studi Sistem Informasi.
- b. Sebagai alat ukur untuk menilai pemahaman mahasiswa dalam penelitian

4. Bagi Pembaca

- a. Sebagai sarana dan media untuk menerapkan dan mengembangkan wawasan di bidang ilmu pengetahuan dan komputer.
- b. Menambah wawasan dan pengalaman dalam penerapan Sistem Pendukung Keputusan dengan menggunakan Metode *Simple Additive Weighting* untuk menentukan pemberian Dana Bantuan kepada Keluarga Miskin.

1.7 Tinjauan Umum Objek Penelitian

1.7.1 Sejarah Berdirinya

Nagari Tebing Tinggi terletak dalam wilayah kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Yang terdiri dari Empat Suku antara lain Melayu Gadang, Melayu Kecil, Caniago dan Sikumbang. Dan sebagai Pucuk Adat Nagari adalah Makudum Sakti. Makudum Sakti dibunyikan dalam pepatah dan petitih Adat “ Sumua Ciek Galuaknyo Ampek” dan itulah yang dinamakan Makudum Sakti (Orang Tua Adat Nagari Tapan).

Inilah dasar mufakat antara empat suku untuk memilih Wali Nagari sebagai Pemimpin Nagari Tebing Tinggi yang berdiri pada tahun 1824 M.

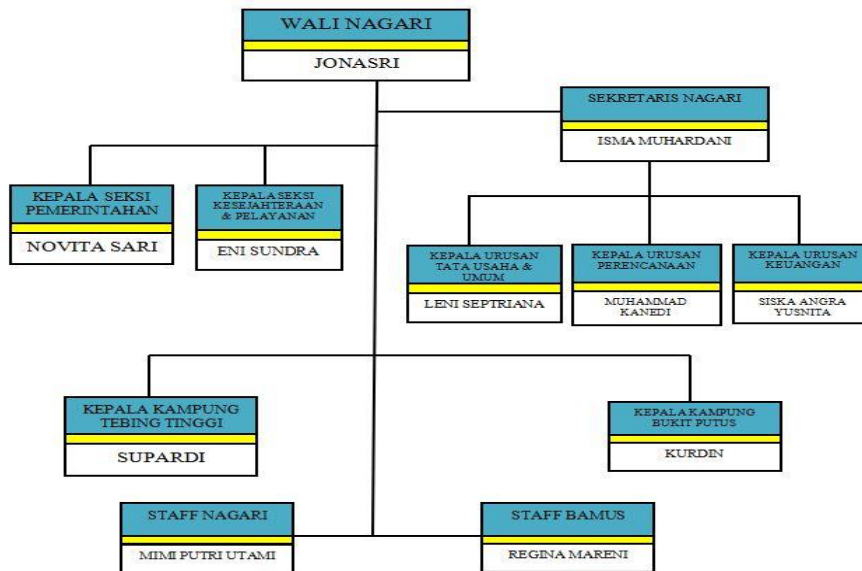
1.7.2 Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Kampung Tebing Tinggi

Tapan

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai suatu alat organisasi yang akan memberikan gambaran sistematis tentang hubungan-hubungan yang terjadi serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing organisasi / bagian dari organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal demi mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan pengertian diatas, suatu struktur organisasi sangat mempunyai arti penting agar pelaksanaan suatu kegiatan, tugas dan fungsi usahanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. bentuk dari struktur organisasi dapat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, dan bentuk ini selalu dipengaruhi oleh fungsi dasar kerja dari jenis kegiatan usahanya atau besar kecil dari organisasi tersebut. Untuk mengetahui struktur organisasi Kantor Wali Nagari Kampung Tebing Tinggi Tapan lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI



1.7.3 Pembagian Tugas dan Wewenang

Dari struktur organisasi diatas dapat dilihat dan dijelaskan secara garis besar peranan masing-masing lembaga serta tugas dan tanggung jawab setiap anggota pada Kantor Wali Nagari Kampung Tebing Tinggi Tapan adalah sebagai berikut :

1. Wali Nagari

Tugas dari wali nagari adalah Menyelenggarakan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, Mengajukan rancangan peraturan Nagari, Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD, Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, Membina kehidupan masyarakat Nagari, dll.

2. Sekretaris Nagari

Tugas Pokok Sekretaris Nagari adalah Membantu Wali Nagari dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Nagari, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

3. Kepala Urusan Tata Usaha, Umum dan Perencanaan

Tugas Pokoknya adalah membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan Nagari, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

4. Kepala Urusan Keuangan

Tugas pokok Kepala Urusan Keuangan adalah membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Nagari, pengelolaan administrasi keuangan Nagari dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Nagari.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas pokoknya adalah membantu Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Nagari.

6. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan umum di tingkat nagari.

7. Kepala Kampung

Tugasnya adalah membantu pelaksanaan tugas Wali Nagari dalam wilayah kerjanya, melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat, melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.

8. Staf Nagari

Staf ini memiliki tugas untuk memberikan saran, konsultasi, dll.

9. Staf Bamus

Menetapkan agenda, memberi saran atau pendapat, merekomendasikan pembentukan panitia dan melaksanakan tugas lain yang diserahkan.